



DPRD Pakai Angket

Ahok Ogah Kompromi Satu Sen Pun

Balai Kota, Warta Kota

Panasnya hubungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta masih berlanjut. DPRD akan melakukan impeachment atau pemakzulan kepada Ahok, sapaan Basuki.

Namun, setelah melakukan rapat dengan seluruh fraksi, DPRD sepakat memilih menggunakan hak angket untuk melanjutkan perseteruan tersebut.

"Kami sepakat menggunakan hak angket. Kami sudah melihat jelas tindakan gubernur yang mengirimkan hasil pembahasan APBD ke Kemendagri. Tetapi bukan dari hasil pembahasan yang dilakukan bersama-sama," kata Jhonny Simanjuntak, Ketua Fraksi PDIP, di Gedung DPRD, DKI, Senin (16/2).

Padahal, kata Jhonny, paripurna sudah disahkan seharusnya dibahas kembali oleh dewan agar hak *budgeting* dewan terakomodir.

"Draft APBD yang diserahkan oleh Pemprov ke Kemendagri merupakan pelanggaran hukum. APBD yang dikirim bukanlah APBD yang disahkan pada 27 Januari 2015. Seharusnya, kami sebagai anggota dewan yang memiliki hak *budgeting*, eksekutif harus membahas terlebih dahulu APBD yang disahkan pada 27 Januari, baru dikirim ke Kemendagri," kata Jhonny.

Jhonny mengatakan, penggunaan hak angket tersebut bukan bermaksud untuk menjadi penghambat penggunaan APBD. Pihaknya ingin menunjukkan yang dilakukan Ahok merupakan pelanggaran undang-undang.

"Untuk *e-budgeting* yang dilakukannya itu ada setelah pembahasan dan pengesahan. Kami setuju dengan *e-budgeting*, tapi bukan itu akar masalahnya. Kami akan akan lakukan hak angket secepatnya," kata Jhonny.

Santai

Sementara itu, Ahok menanggapi rencana pemakzulan tersebut dengan santai. Ia siap untuk duduk bersama melakukan interpelasi.

"Saya santai saja. Enggak usah perang di media, suruh dia rapim, interpelasi. Nanti dia hak tanya, kami punya hak jawab. Lalu kalau dia mau *impeach*, silakan *impeach*," kata Ahok di Balai Kota.

“Kami sudah melihat jelas tindakan gubernur yang mengirimkan hasil pembahasan APBD ke Kemendagri. Tetapi bukan dari hasil pembahasan yang dilakukan bersama-sama.”

JHONNY SIMANJUNTAK

Ahok beranggapan interpelasi merupakan hak dari setiap anggota dewan. Maka ia siap untuk interpelasi tersebut.

"Itu diatur UU. Justru saya lebih senang, supaya mereka gunakan hak tanya. Nanti kami jawab di forum terbuka," katanya.

Ahok mengatakan, permasalahan tersebut muncul karena ia enggan melakukan kompromi dengan DPRD.

"Mulai sekarang anggota DPRD harus mulai hati-hati juga. Kalau dicek pajaknya dari pusat semua, sesuai enggak gaya hidupnya semua. Pajak, duit, aliran dana. Ini sejarah. Untuk pertama kali di republik ini. Kenapa Gubernur DKI ribut dengan DPRD. Karena saya tidak mau kompromi. Satu sen pun saya tidak mau kompromi," kata Ahok.

Kembalikan draft

Sementara itu, Pemprov DKI sendiri tampaknya acuh dengan permasalahan tersebut. Pemprov terus melanjutkan proses pengajuan APBD sesuai yang diminta oleh Kemendagri.

"Kami hari ini sudah kembalikan lagi draft APBD yang telah direvisi ke Kemendagri," kata Saefullah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta.

Revisi yang diminta oleh Kemendagri itu empat poin. Pemprov pun telah melakukan revisi seluruhnya.

Proses pencairan APBD, menurut Saefullah, paling lama tujuh hari setelah revisi dikirim. Karena itu, Pemprov yakin pada akhir bulan ini, APBD tersebut sudah bisa dicairkan. Dananya bisa dimanfaatkan untuk penerapan program-program yang sudah direncanakan Pemprov DKI.

“Itu diatur UU. Justru saya lebih senang, supaya mereka gunakan hak tanya. Nanti kami jawab di forum terbuka.”

BASUKI TJAHAJA PURNAMA
Gubernur DKI

Revisi Empat Poin

- Pertama merevisi nomor rekening yang sebelumnya tidak lengkap.
- Kedua lampiran KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) sudah dikirim.
- Ketiga Rekomendasi dana hibah.
- Keempat rincian Penyerta Modal Pemerintah (PMP).

Hemat anggaran

Sementara itu, penggunaan *e-budgeting*, kata Saefullah dapat menghemat sebanyak Rp 4 triliun. Ia mencontohkan ada nomenklatur pembinaan guru matematika tingkat SMP yang biayanya sebesar Rp 200 juta. Sebelum menggunakan *e-budgeting*, uang Rp 200 juta tersebut harus dihabiskan. Dengan *e-budgeting*, biaya guru matematika itu disesuaikan dengan kebutuhannya saja.

"Seperti untuk beli buku, pensil, transportasi dan sebagainya itu tidak mungkin bulat Rp 200 Juta, melainkan hanya Rp 160 juta. Itulah penghematan yang terjadi, dengan sistem *e-budgeting*. Karena orientasinya pada kebutuhannya, bukan pada anggarannya," kata Saefullah. (suf)